

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah menggalahkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan, yang selanjutnya dikenal dengan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dikenakan atas pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain.

Salah satu sistem Perpajakan yang digunakan untuk memotong pemungutan PPh Pasal 21 yaitu *Withholding System*, dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga. Potongan PPh Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan lainnya.

Disisi lain tidak jarang ditemui kekeliruan didalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang disetor, dimana perubahan terhadap status wajib pajak orang pribadi (karyawan perusahaan) tidak dapat diakui di dalam Undang-Undang Perpajakan, seperti perubahan status karyawan atau tanggungnya yang terjadi diluar tahun pajak yang bersangkutan. Dan mungkin ada kendala atau kekeliruan lainnya, termasuk didalam angka-angka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan memperhatikan hal diatas, terlihat jelas begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang memberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPh.

Perusahan sebagai pemotongan pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado yang bergerak dibidang jasa. Pada saat ini perhitungan PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi Wajib Pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Oleh sebab itu, pada perhitungan yang penulis hitung hanya mengambil 15 karyawan tetap pada perusahaan. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21 dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul tentang **“Laporan Akhir Praktek Akuntansi Dan Mekanisme Pemungutan PPh 21 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan akhir praktek ini adalah bagaimana akuntansi dan mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh pasal 21 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir praktek ini adalah untuk mengetahui akuntansi dan mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan akhir praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis :

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan serta pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado.

2. Bagi Perusahaan :

Dapat memberikan masukan serta informasi tentang mekanisme pemungutan serta pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

3. Bagi Institusi:

Menciptakan mahasiswa yang mampu bersaing di dunia kerja.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan Praktek Akuntansi dan perpajakan PPh pasal 21 yang diterapkan diperusahaan.

1.6 Deskripsi Umum Entitas

a. Sejarah Singkat Entitas

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola Bandara Udara di Indonesia. PT. Angkasa Pura I (Persero) berawal dari dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tanggal 15 November 1962 dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura “Kemayoran” dan merupakan

Perusahaan Negara pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai proyek percobaan dalam pengurusan dan pengusahaan Bandar Udara Kemayoran.

PT (Persero) Angkasa Pura I (Persero) mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah Bandar Udara Kemayoran Jakarta, yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1934. Dalam keadaan yang sangat sederhana, Kemayoran mengalami masa-masa pergantian penguasaan sampai dengan awal Perang Dunia II tahun 1942, Bandar Udara Kemayoran dikuasai oleh Belanda yang diambil alih oleh Jepang tahun 1945.

Tak lama kemudian, pada tanggal 15 November 1962 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik.

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah. Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia. Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai-Bali, Halim Perdanakusumah - Jakarta, Polonia-Medan, Juanda - Surabaya, Sepinggan-Balikpapan, dan Sultan Hasanuddin- Ujung pandang, kemudian

bergabung dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-470.HT.01.01.

Hingga saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu:

1. Bandara Ngurah Rai - Denpasar
2. Bandara Juanda – Surabaya
3. Bandara Hasanuddin – Makassar
4. Bandara Sepinggan – Balikpapan
5. Bandara Frans Kaisiepo – Biak
6. Bandara Samratulangi – Manado
7. Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin
8. Bandara Ahmad Yani – Semarang
9. Bandara Adisutjipto – Yogyakarta
10. Bandara Adisumarmo – Surakarta
11. Bandara Internasional Lombok - Lombok Tengah

12. Bandara Pattimura – Ambon

13. Bandara El Tari - Kupang

Dari 13 Bandara yang dikelola PT.Angkasa Pura I (Persero) yang berada di wilayah Indonesia tengah Bandara udara Samratulangi Manado adalah salah satunya yang pada awalnya dibangun pada tahun 1942 oleh Jepang dengan nama bandara “Lapangan Udara Mapanget”. Seiring berjalannya waktu, Lapangan udara Mapanget mengalami beberapa perubahan nama yaitu Lapangan Udara Tugiman dan Lapangan Udara A.A. Marimis.

Akhirnya, untuk mengenang Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Minahasa Sulawesi Utara yaitu Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, bandara ini oleh pemerintah dinamakan Lapangan Udara Samratulangi yang kemudian dikenal hingga saat ini sebagai Bandara Udara Samratulangi Manado.

Pada tahun 1994 Bandara Udara Samratulangi menjadi bandara udara internasional kelas 1B seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, sehingga *Runway* diperluas dengan panjang 2.650 meter dengan lebar 45 meter. Kemudian dilaksanakan serah-terima secara operasional dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado pada tanggal 18 Desember 2003.

Visi dan misi PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado adalah :

Visi Perusahaan : Menjadikan salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola Bandar udara terbaik di Asia.

Misi Perusahaan :

- a. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan
 - b. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
 - c. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
 - d. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi.
 - e. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup.
- A. Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi**

Gambar 1.1 Struktur organisasi PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado

Job Deskripsi

- a. *Direktur Utama*
 - *Sekretaris Perusahaan*
- b. *Airport Operation & Readiness Departement Head*
 - *Airport Services Section*
 - *Airport Facilities & Readiness Section Head*
 - *Airport Equipment Section Head Section Head*
 - *Fire Fighting & Rescue Section Head*
- c. *SMS, QM & CS Departement Head*
 - *Safety Health Environment Section Head*
 - *Quality Management Manajer Departemen Distribusi*
 - *Customer Service section Head*
- d. *Sales Departement Head*
 - *Aviation & Cargo Sales Section Head*
 - *Property & Beverage Sales Section Head*
 - *Food & Beverage Sales Section Head*
 - *Retail Section Head*
- e. *Finence & It Departement Head*
 - *Accounting Section Head*
 - *Treasury Section Head*
 - *Information Technology Section Head*
 - *CSR Section Head*

f. *Shared Services Departement Head*

- *Human Capital Section Head*
- *PTS General Affair & Comn Section Head*
- *Procurement section Head*

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado, dipimpin Oleh manajer *finance* dan *information technology department head* membawahi :

1. *Accounting Section Head*
2. *Treasury Section Head*
3. *Information Tecnology Section Head*
4. *Corporate Social Responsibility Section Head*

g. ***General Manager***

General manager atau yang sering kali disebut *GM. General Manager* merupakan fungsi jabatan kerja pada sebuah perusahaan yang bertugas, memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda perusahaan.

h. ***Manager Finance dan Information Technology Departement Head (MDC. FN)***

Manager Finance dan Information Technology Departement Head (MDC. FN) adalah memastikan peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian melalui implementasi pengelolaan keuangan dan *Information*

Technology (IT) guna mendukung tercapainya pendapatan *non aeronautika* dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan Rencana kerja dan anggaran Perusahaan(RKAP).

- a) *Accounting section head* (MDC.FA) adalah memastikan tercapainya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta pengendalian anggaran melalui verifikasi, pencatatan dan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mendukung peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan standar akuntansi keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b) *Treasury Section Head* (MDC.FT) adalah memastikan operasional penerimaan dan pengeluaran kas/bank, operasional pajak dan pencairan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan melalui perencanaan, pencatatan, evaluasi, rekonsolidasi pemantauan (*monitoring*) dan pelaporan guna mendukung peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan pedoman kebijakan perusahaan dan perpajakan. Di perusahaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado yang mengambil ahli pada bagian perpajakan atau yang bertanggung jawab adalah satu karyawan pada perusahaan yang memungut pph pasal 21 atas gaji karyawan.
- c) *Information Technology Section Head* (MDC.FI) adalah memastikan dilakukannya layanan *Information Technology* (IT) di bandara udara melalui pengelolaan kegiatan yang efektif guna mendukung terpenuhinya kepuasan

pelanggan internal dan eksternal berdasarkan Rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP).

- d) *Coperate Sosial Responsibility section Head* adalah memastikan penyaluran dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditetapkan melalui survey penyaluran , penagihan, pemantauan, dan pelaporan guna mendukung tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan.

b. Aktivitas Usaha

Bidang usaha PT.angkasa pura I (persero) Manado Cabang bandara udara internasional Sam ratulangi Manado secara garis besar adalah jasa kebandaraudaraan (*airport services*) yang terbagi atas 2 bagian besar yaitu jasa *aeronautika* dan jasa *non-aeronautika*.

Jasa *aeronautika* adalah jasa layanan yang memberikan kepada penerbangandan penumpang terdiri dari :

- a. *Aircraft Parking*, jasa penempatan dan penyimpanan pesawat dan area bandara udara.
- b. *Passenger Processing*, jasa layanan penumpang dalam bandara udara.

Jasa *non-aeronautika* adalah jasa layanan pendukung kebutuhan perusahaan penerbangan dan penumpang dengan berbagai pihak yang terdiri dari :

- a. *Food and Beverages*, layanan makanan dan minuman didalam maupun diluar terminal bandar udara.
- b. *Retail*, layanan perbelanjaan untuk kebutuhan penumpang.
- c. *Advertising*, sebagai fasilitas umum yang strategis, bandar udara menyediakan ruang bagi iklan yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan.
- d. *Property*, bandar udara menyewakan ruang dalam maupun diluar terminal penumpang yang dapat disewa untuk berbagai kebutuhan.
- e. *Parkir Kendaraan*, layanan parkir kendaraan penumpang maupun penjemput termasuk didalamnya layanan *airport shuttle*, *taxy*, bus dan lainnya.
- f. *Cargo Service*, layanan pengelolaan kargo pesawat termasuk didalamnya pemeriksaan dan penyimpanan kargo yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura Logistik.